

**PENGARUH KEMAMPUAN APARAT DESA TERHADAP
KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN BONE KABUPATEN
BONE BOLANGO**

Oleh :

**NUR AIN LAJAMBU
E.11.17.028**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH KEMAMPUAN APARAT DESA TERHADAP
KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN BONE KABUPATEN
BONE BOLANGO

Oleh :

NUR AIN LAJAMBU
E.11.17.028

SKRIPSI

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan
Gorontalo.....

Pembimbing I



Dr. Abdul Gaffar M.Si
NIP.1962123119871029

*Atc : 25/05/2022
Muh. Liliyan Gaffar*

Pembimbing II



Rusdi Abdul Karim, SE., M.AK
NIDN. 0902086402

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH KEMAMPUAN APARAT DESA TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH :

NUR AIN LAJAMBU

E.11.17.028

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Reyther Biki, SE., M.Si
(Ketua Penguji)
2. Rizka Yunika Ramly, SE., M. Ak
(Anggota Penguji)
3. Shella Budiawan, SE.M.Ak
(Anggota Penguji)
4. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si
(Pembimbing Utama)
5. Rusdi Abdul Karim, SE.M.SI
(Pembimbing Pendamping)

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Mursafir, SE., M.Si
 IDN. 09 281169 01

Ketua Program Studi Akuntansi


Rusdi Abdul Karim, SE., MSA
 IDN. 09 280586 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik pada Universitas Ichsan Gorontalo maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2022

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPER
7BA58AJX884523135

NUR AIN LAJAMBU

E. 111.7028

MOTTO & PERSEMBAHAN

***Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(Q.S ASY-SYARH, 94: 5)***

***Dan sungguh, kelak tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu,
sehingga engkau menjadi puas
(Q.S AD-DUHA, 93: 5)***

***Setiap kesulitan yang dihadapi pasti ada jalan untuk menyelesaikannya namun
semua itu harus diiringi dengan berusaha dan berdoa agar mencapai
kesuksesan yang diinginkan
(Nur Ain Ladjambu)***

persembah :

Bissmillahirrahmanirahim

*Sembah sujudku kepada Allah SWT atas ridho dan karunianya. Dengan rasa
syukur yang mendalam kupersembahkan karya kecilku ini sebagai ungkapan
terima kasihku*

Kepada:

MAMAKU YUSNA MOHA DAN PAPAKU YUSDIN LAJAMBU

***Yang telah mengikhlaskan cucuran keringat dalam membesarkanku mendidik
dan senantiasa berdoa sepanjang waktu untuk keberhasilanku. Serta untuk
keluargaku, kakak-kakaku yang tersayang Hendriyanto lajambu Amd ,sri
Heldianti lajambu SH, Nuriman lajambu dan juga kakak iparku samsia ibrahim
SP, wahyuni djufri , dan untuk sumaiku efras t giolan dan khususnya ketiga
anak-anakku.***

INDONESIA TANAH AIRKU TERCINTA

DAN

**ALMAMATERKU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang atas ridho, pertolongan dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango”**. Shalawat dan salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah SAW dan seluruh pengikutnya yang istiqomah.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Ilmu Akuntansi di Universitas Ichsan Gorontalo, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi Ilmu Akuntansi. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Walaupun demikian, peneliti berharap agar skripsi ini dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta. Ucapkan terimakasih yang tulus juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. H. Abdul Gaffar, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku pembimbing I, Bapak Dr.Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim,SE.,M.SA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Rusdi Abdul Karim, SE.M.Ak selaku pembimbing II serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah

banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan proposal ini. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu peneliti, baik berupa petunjuk, bimbingan maupun dorongan moral dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan dapat bernilai pahala dan mendapat balasan dari Allah SWT, amin. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Gorontalo, 2022

NUR AIN LAJAMBU

ABSTRACT

NUR AIN LAJAMBU. E1117028. THE EFFECT OF VILLAGE APPARATUS CAPABILITIES ON THE QUALITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN BONE SUBDISTRICT, BONE BOLANGO DISTRICT

This study aims to find the effect of the village apparatus capabilities on the quality of village financial management in Bone Subdistrict, Bone Bolango District, Gorontalo Province. This study employs a probability sampling with some respondents, namely 56 apparatuses. The type of data used is primary data. The method of data collection is through a questionnaire. The data analysis technique uses path analysis by using the SPSS version 21 program. The results of the study indicate that the village apparatus capabilities (x) simultaneously affected the quality of village financial management (Y) in the Bone subdistrict office by 0.866 (86.6%). There is 0.134 (13.4%) influenced by external variables that are not examined. The education of village apparatus (X1) is 0.434 (43.4%). Training of village apparatus (X2) is 0.413 (41.3%). The variable of Experience of village apparatus (X3) is 0.212 (21.2%) and has a partial effect on the quality of village financial management (Y).

Keywords: ability, village apparatus, quality, village financial management

ABSTRAK

NUR AIN LAJAMBU. E1117028. PENGARUH KEMAMPUAN APARAT DESA TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan aparat desa terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bone kabupaten bone bolanggo provinsi gorontalo. *probability sampling* dengan jumlah responden sebanyak 56 orang pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis path dengan menggunakan program spss versi 21. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan aparat desa (x) secara *simultan* berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa (Y) Pada kantor dikecamatan Bone sebesar 0,866 (86,6%), terdapat sebesar 0,134 (13,4%) dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak diteliti. Pendidikan aparat desa (X1) sebesar 0,434 (43,4%). Pelatihan aparat desa (X2) sebesar 0,413 (41,3%), Pengalaman aparat desa (X3) sebesar 0,212 (21,2%) berpengaruh secara *parsial* terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa (Y) .

Kata kunci: kemampuan, aparat desa, kualitas, pengelolaan keuangan desa

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Maksud Penelitian.....	8
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	12
2.1. Kajian Pustaka	12
2.1.1 Pengertian Desa	12
2.1.2 Pemerintahan Desa	13
2.1.3 Kemampuan Aparat Desa	17
2.1.4 Keuangan Desa.....	20
2.1.6 Alokasi Dana Desa.....	22
2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa	24
2.1.7. Penelitian Terdahulu	28
2.2 Kerangka Pemikiran	29

2.3. Hipotesis.....	30
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Objek Penelitian	32
3.2. Metode Penelitian	32
3.2.1. Desain Penelitian	32
3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	33
3.2.3 Populasi dan Sampel.....	34
3.2.3.1 Populasi	34
3.2.3.2 Sampel.....	36
3.2.4 Jenis Dan Sumber Data.....	36
1. Jenis Data.....	36
2. Sumber Data	37
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian.....	38
1. Uji Validitas Angket	38
2. Uji Reliabilitas	40
3. Transformasi Data Ordinal ke interval.....	41
3.2.7 Metode Analisis Data.....	42
3.2.8 Pengujian Hipotesis	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaram Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.2 Profil Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango	45
4.1.2 Keadaan Geografis.....	45
4.1.3 Kondisi Desa	45
4.1.4 Visi Dan Misi	46
4.1.7 Karakteristik Responden	49
4.2 Deskripsi Responden.....	51
4.2.1 Karakteristik Variabel Penelitian.....	51
4.2.2 Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas.....	59
4.2.3 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas pendidikan	60
4.2.4 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas pelatihan	60
4.2.5 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas pengalaman.....	61

4.2.6 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Y	61
4.3 Analisis Data Statistik dan Pengujian Hipotesis	62
4.3 Pembahasan hasil penelitian	65
4.3.1 Pengaruh kemampua aparat desa.....	65
4.3.2 Pengaruh pendidikan X1	66
4.3.3 Pengaruh Pelatihan X2.....	67
4.3.4 Pengaruh Pengalaman X3	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
Lampiran-Lampiran.....	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Operasional Variabel X-Y	34
Tabel 3.2 Bobot Nilai Variabel	35
Tabel 3.3 Populasi	36
Tabel 3.4 Sampel	37
Tabel 3.5 Koefisien Korelasi.....	38
Tabel 4.1 Anggaran Dana desa.....	41
Tabel 4.2 Penyebaran Kuesioner	50
Tabel 4.3 Jenis kelamin responden	52
Tabel 4.4 Usia Responden	53
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan	53
Tabel 4.6 Skala Penelitian	54
Tabel 4.7 Nilai skor variabel Pendidikan.....	55
Tabel 4.8 Nilai skor variabel Pelatihan.....	56
Tabel 4.9 Nilai skor variabel pengalaman	57
Tabel 4.10 Nilai Skor variabel Y	58
Tabel 4.11 Uji Validitas dan Reabilitas sub variabel(X1)	59
Tabel 4.12 Uji Validitas dan Reabilitas sub variabel(X2)	60
Tabel 4.13 Uji Validitas dan Responden sub variabel(X3).....	61
Tabel 4.14 Uji Validitas dan Reabilitas sub variabel(Y)	62
Tabel 4.15 Hasil Estimasi Pengujian hip dan besar pengaruhX ➤Y	63
Tabel 4.16 Dekomposisi Pengaruh variabel X ke variabel Y	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia saat ini telah berubah dari yang sentralistik menjadi desentralistik. Sentralistik sempat populer pada masanya namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman system ini tidak diterapkan lagi karena dinilai tidak mampu menampung aspirasi atau pendapat daerah-daerah khususnya yang dinilai terpencil atau terisolir. Wilayah terdepan dalam pemberian pelayanan pada masyarakat adalah pemerintah desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor :140/640 SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar Tumbuh dan

berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, pemberdayaan

Masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan nonfisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/dusun/banjar/jorong, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggung jawabkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1,

ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2015 Pasal 71 Ayat 1 yang dimaksud Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri (Menteri Dalam Negeri). Kemudian pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, Badan Permusyawaratan Desa (BAMUS) yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp1,4 miliar harus dikelola dengan professional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Karena itu, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa di daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Dengan adanya aturan tersebut, maka Pemprov terus berupaya memberikan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa. Caranya, dengan melakukan bimbingan teknik pengelolaan keuangan daerah bagi aparatur pemerintah desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan dengan baik dan tertib administrasi.

bagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara profesional dalam rangka menciptakan ke makmuran bagi masyarakat. Akan tetapi, berbagai problema muncul dan berpotensi menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa. Problema tersebut antara lain :

- a. Potensi terjadinya korupsi dan kecurangan (fraud).Pengelolaan keuangan desa melibatkan dana yang relatif besar. Hal ini tentu dapat menimbulkan potensi terjadinya berbagai kecurangan dan tindak korupsi oleh berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa. Apalagi jika berkaca pada berbagai kasus korupsi di level pemerintah pusat dan daerah, dimana kekuasaan telah menjadikan banyak kepala daerah, menteri, dan pejabat negara/daerah tersangkut praktik korupsi dan gratifikasi.
- b. Problema terkait penyusunan dan penetapan APBDesa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan atas APBDesa yang mencerminkan alokasi pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun. APBDesa merupakan unsur pokok dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, berbagai masalah muncul dalam penyusunan dan penetapan APBDesa.
- c. Dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang mencukupi agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan optimal, terlebih lagi proses pengelolaan keuangan yang rumit membutuhkan keahlian yang mampu dari pemerintah desa dan bamus serta unsur lain dalam masyarakat yang terlibat.

Dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya pengelolaan dan desa tersebut di atas, pemerintah pusat memfasilitasi masalah sumber daya manusia dengan membuat regulasi yang mungkin adanya pendamping desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa (Permendesa Nomor 3 tahun 2015). Salah satu tujuan dari

pendampingan desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pendampingan dilakukan oleh tiga jenis pendamping, yaitu :

1. Tenaga pendamping profesional, meliputi pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
2. Kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau
3. Pihak ketiga, terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

- a. Transparan, terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau di rahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).
- b. Akuntabel,Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung

jawabkan (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban.

- c. Partisipatif, Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran, Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD). Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Bidang Keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, di peroleh informasi dari masyarakat menggambarkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan bone, Kabupaten Bone Bolango masih terdapat banyak permasalahan, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah `sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Kemampuan Aparat Desa yang meliputi Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), dan Pengalamam (X3) secara *simultan* terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango
2. Seberapa besar pengaruh Kemampuan Aparat Desa yakni Pendidikan (X1) secara *parsial* terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

3. Seberapa besar pengaruh Kemampuan Aparat Desa yakni Pelatihan (X2) secara *parsial* terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.
4. Seberapa besar pengaruh Kemampuan Aparat Desa yakni Pengalamam (X3) secara *parsial* terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis data berupa Kemampuan Aparat Desa yang terdiri dari Pendidikan (X1), Pengetahuan (X2) dan Pengalaman (X3) dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis besarnya Kemampuan Aparat Desa yang meliputi Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), dan Pengalaman (X3) secara *simultan* terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis besarnya Kemampuan Aparat Desa Pendidikan (X1) secara *parsial* terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

3. Untuk mengetahui dan Menganalisis besarnya Kemampuan Aparat Desa yakni Pelatihan (X2) secara *parsial* terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.
4. Untuk mengetahui dan Menganalisis besarnya Kemampuan Aparat Desa yakni Pengalamam (X3) secara *parsial* terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa-desanya yang ada di Kecamatan Bone, juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.
3. Bagi masyarakat Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa di

Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggung jawab.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/dusun/banjar/jorong.blogspot.co.id/2014/07/16.

Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. (wikipedia.org/wiki).

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan nya dengan daerah-daerah lain. (wikipedia.org/wiki) Selanjutnya Bintarto (wikipedia.org/wiki), mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Pengertian desa kemudian diterangkan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
2. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-

peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang di pilih dan di tetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan beradadi daerah Kabupaten dalam WidjayaHAW.(2003), rumusan definisi Desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintah daerah: “Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasa 118 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwadesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP 2015). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan local berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan

desa dan prakasa masyarakat desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, s aluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana kewilayahan
- c. Pelaksana Tehnis

2. Badan Pemusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

3. Kelembagaan Masyarakat Desa

Didalam Undang-Undang Desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

Pembentukannya LKD diatur dalam Peraturan Desa, dengan rincian tugas:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikutserta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

2.1.3 Kemampuan Aparat Desa

Sutrisno (2009:221) mengatakan bahwa Kemampuan (kompetensi) adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang di hubungkan dengan hasil yang di peroleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Kemudian Azhar (2007: 78) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”.

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Jelita, (2013:121) Kemampuan (kompetensi) sumber daya manusia dapat dilihat dari:1). Pendidikan, 2).Pelatihan, 3).Pengalaman.

Widiyastuti dan Pamudii, 2009). Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya.

Cloyd (1997) dalam Mardisar dan Sari (2007) menemukan bahwa besarnya usaha (proksi dari variabel akuntabilitas) yang dicurahkan seseorang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Selain itu Cloyd (1997) dalam Mardisar dan Sari (2007) juga menemukan bahwa tingkat pengetahuan seseorang dapat meningkatkan kualitas hasil kerja.

Harhinto (2004) menemukan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian dalam melaksanakan tugas yang pada gilirannya akan menentukan kualitas hasil. Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa secara umum seorang akuntan harus memiliki pengetahuan-pengetahuan, yaitu : pengetahuan Akuntansi secara umum, pengetahuan area fungsional, pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, pengetahuan mengenai industri khusus, dan pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah

Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh akuntansi antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistic, keterampilan menggunakan computer (minimal mampu mengoperasikan *word processing* dan *spread sheet*), serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Hasibuan (2008: 69) Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, keterampilan, dan moral karyawan sesuai dengan

kebutuhan pekerja/jabatan melalui pelatihan. pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.

Menurut Rahmawati (2008:117) Pelatihan merupakan unsur kompleks yang diberikan untuk membantu karyawan mempelajari keterampilan yang akan meningkatkan kinerja mereka di mana akan membantu perusahaan mencapai sasarannya. Pelatihan dan pengembangan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar system pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik dari pada teori. Sementara itu keterampilan adalah meliputi pengertian physical skill, intellectual skill, social skill, managerial skill, dan lain-lain.

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberi peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani Puspaningsih, 2004).

Menurut Dwi Ananing (2006), pengalaman kerja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Lama bekerja, Menurut Widyanto dan Yuhertian (2005), pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman yang dimiliki oleh seorang akuntan yang dihitung berdasarkan suatu waktu atau tahun.
- b. Banyaknya penugasan yang di tangani, Pengalaman kerja seseorang di tunjukkan dengan jenis-jenis pekerjaan ataupun banyaknya penugasan yang

pernah dilakukan seseorang dan akan memberikan peluang yang besar untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

- c. Banyaknya jenis perusahaan yang pernah dilakukan, Pengalaman dari banyaknya jenis tugas yang telah dilakukan memberikan suatu pengalaman yang lebih bervariasi dan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian.

Warisno (2009) dalam rangkap Pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan karena permasalahannya adalah untuk menerapkan akuntansi double entry berbasis akrual diperlukan sumber daya manusia yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur pemda yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penata usahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda. Kegagalan SDM pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

2.1.4 Keuangan Desa

Pasal 1 angka 10 dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 6/2014 menyebutkan: “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Definisi keuangan desa di atas apabila di bandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6/2014 disebutkan: “Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) diatas terdiri dari:

1. Pendapatan asli Desa;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
4. Alokasi anggaran dari APBN;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut di arahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Pasal 26 ayat (2) huruf c jo. Pasal 75 ayat (1) UU No. 6/2014 menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk, demikian ditegaskan juga dalam Pasal 72 ayat (5) jo. Pasal 75 ayat (2) UU No. 6/2014.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Otonomi daerah sangat mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya dari desa sendiri maupun dariluar. Salah satu sumber daya dari luar desa yaitu alokasi dana dari Pemerintah Daerah yang disebut Alokasi Dana Desa. Adanya Alokasi Dana desa (ADD) tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber

daya penerimaanyang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di desa. Salah satu hal yang penting untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangkamewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangkap pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat.

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 huruf g UU No. 6/2014.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa dalam UU No.6/2014 menyisakan sejumlah pertanyaan kritis mengenai tata cara proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan desa.

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2015 yang dimaksud Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Di dalam Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan, dan
5. Pertanggungjawaban.

Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri (maksudnya Menteri Dalam Negeri). Kemudian jika kita lihat juga pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Gambaran rincian proses siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :



1. **Perencanaan**, Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.
2. **Pelaksanaan**, Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.
3. **Penatausahaan**, Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.
4. **Pelaporan**, Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan

selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

5. **Pertanggungjawaban,** Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat provinsi kabupaten kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, laporan dan

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan keuangan Desa (BPKP 2015)

2.1.7 Penelitian Terdahulu

1. Mukhlisul Muzahid (2014), Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Aceh Utara. Menggunakan Metode analisis deskriptif, kemudian pengujian hipotesis dipakai metode analisis jalur (*pathanalysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan Pengalaman baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan

keuangan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tahun penelitian, metode analisis data dan lokasi penelitian.

2. Ruri Widiastuti (2013), Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung. Menggunakan Metode analisis deskriptif, kemudian pengujian hipotesis dipakai metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara *simultan* maupun *parsial* Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, tahun penelitian, metode analisis data dan lokasi penelitian.

3. Warisno (2009) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan karena permasalahannya adalah untuk menerapkan akuntansi double entry berbasis akrual diperlukan sumber daya manusia yang memahami logika akuntansi secara baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dari uraian latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dianggap bahwa kemampuan aparat desa terutama dalam bidang akuntansi penting dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembanya terutama pengelolaan Keuangan Desa (Dana Desa). Dalam Undang-undang No. 6

tahun 2015 pasal 93, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

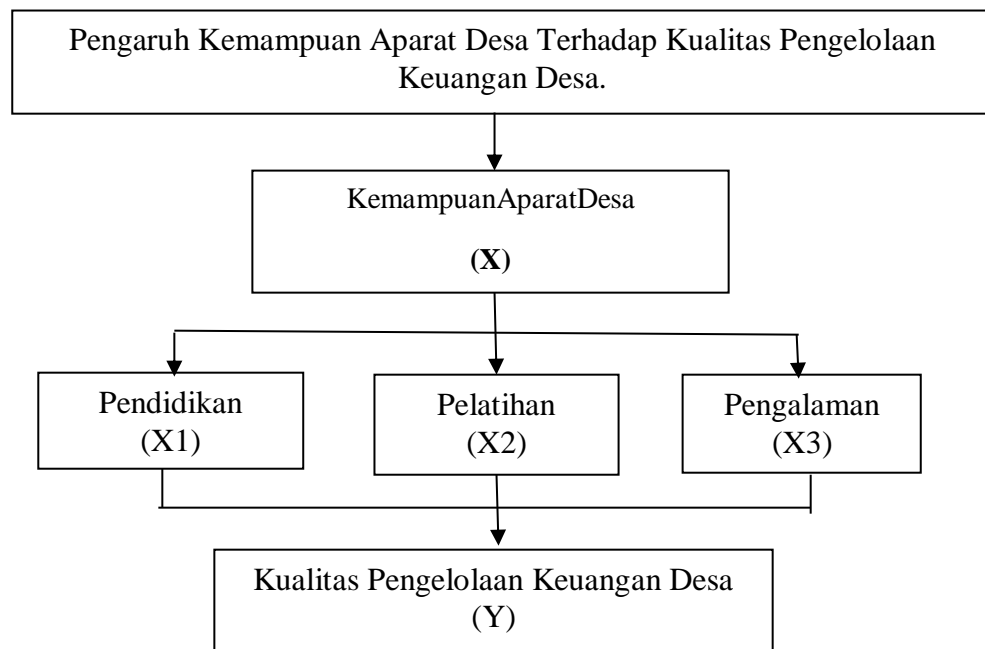
Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp1,4 miliar harus dikelola dengan professional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa.

Berkaitan dengan undang-undang tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi. Di kalangan DPR, muncul kekhawatiran potensi penyalahgunaan anggaran dana desa untuk kepentingan politik, khususnya saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Media Akuntansi,2014).

Dari gambaran diatas, maka dapat dikembangkan suatu pemikiran tentang Kemampuan Aparat Desa terhadap Kualitas Pengelolaan keuangan Desa pada desa-desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango yang tertuang kedalam suatu bagan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

5. Kemampuan Aparat Desa yang meliputi Pendidikan (X1), Pelatihan(X2), danPengalaman (X3) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap KualitasPengelolaan KeuanganDesa pada Desa di Kecamatan Bone Kabupaten BoneBolango.
6. Kemampuan Aparat Desa yakni Pendidikan (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap KualitasPengelolaan KeuanganDesa pada Desa di Kecamatan Bone Kabupaten BoneBolango.
7. Kemampuan Aparat Desa yakni Pelatihan (X2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.
8. Kemampuan Aparat Desa yakni Pengalaman (X3) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap KualitasPengelolaan KeuanganDesa pada Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Pengaruh kemampuan Aparat Desaterhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, dengan lokasi penelitian pada Desa-desa di Desa di Kecamatan Bone Kabupaten BoneBolango.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Nasution (2001:23) Menyatakan bahwa Desain Penelitian merupakan rencana mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian berguna untuk memberi pegangan yang lebih jelas dan memberikan batasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. (Sugiyono, 2012:15)

3.2.2 Operasional Variabel

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka terlebih dahulu perlu mengoperasikan variabel-variabel yang berkorelasi. Sugiono (2007) menjelaskan bahwa variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Yang menjadi variabel penelitian terdiri dari dua variabel dengan sub-sub variabel dari variabel X yaitu kemampuan Aparat Desa terdiri dari Pendidikan (X1), Pelatihan (X2) dan Pengalaman (X3) variabel Y yaitu Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan kerangka pemikiran pada bab sebelumnya, maka operasional variabel dalam penelitian ini adalah yang tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Operasional

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Kemampuan Aparat Desa (X)	Pendidikan (X1)	1. Pendidikan Umum 2. Pendidikan Khusus	Ordinal
	Pelatihan (X2)	1. Materi Pelatihan 2. Metode pelatihan	Ordinal
	Pengalaman (X3)	1. Lama Bekerja 2. Banyak Penugasan 3. Banyaknya Jenis Penugasan	Ordinal
Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Dimensi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban	Ordinal
Sumber : UU No. 6 tahun 2015			

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala *likert*. Teknik skala *likert* yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai skor pada item jawaban. Pemberian skor untuk setiap jawaban

dari pernyataan yang diajukan kepada responden penelitian ini akan mengacu kepada pernyataan Sugiyono (2012) : jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata. Kuesioner disusun dengan menyiapkan (Lima) pilihan yakni : selalu, sering, kurang/kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Selalu	5
Sering	4
Kadang-kadang	3
Jarang	2
Tidak pernah	1

Sumber : Riduwan (2004: 86)

3.2.3 Populasi dan Sampel

3.2.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan definisi populasi menurut Sudjana (2004: 68), populasi adalah totalitas semua hasil yang mungkin menghitung pengukuran kuantitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

pegawai di Desa di Kecamatan Bone Kabupaten BoneBolango, dengan Jumlah 48 orang yang terdiri dari:

Tabel 3.4
Jumlah Populasi

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Desa	14 Orang
2	Sekretaris	14 Orang
3	Kasi Pemerintahan	14 Orang
4	Kasih Pelayanan & Kesejahteraan	14 Orang
5	Kaur Keuangan	14 Orang
6	Kaur Umum & Perencanaan	14 Orang
7	Staf Desa	14 Orang
8	Kepala Dusun 1	14 Orang
9	Kepala Dusun 2	14 Orang
10	Kepala Dusun 3	14 Orang
11	Kepala Dusun 4	14 Orang
Jumlah Populasi		154 Orang

Sumber : Kecamatan Bone Kabupaten BoneBolango.

3.2.3.2 Tehnik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2012:81) mengemukakan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan Arikunto dalam Riduwan (2007:56) mengemukakan Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau mewakili populasi yang diteliti). Kemudian Arikunto dalam Riduwan (2007:76) mengemukakan bahwa apabila sampel kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Oleh karena itu, berkaitan jumlah sampel karena seluruh pegawai di Desa di Kecamatan Bone

Kabupaten BoneBolango, dengan Jumlah 56 orang, maka keseluruhan jumlah tersebut terpilih sebagai responden.

Tabel 3.5
Jumlah Sampel

No	Nama Desa	Jumlah Pegawai
1	Kepala Desa	14 Orang
2	Sekretaris	14 Orang
3	Kasi Kersa	14 Orang
4	Kaur Keuangan	14 Orang
Jumlah Sampel		56 Orang

Data diolah kembali

3.2.4 Jenis Dan Sumber Data

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data diperlukan di kelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Kuantitatif, adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert yang disebarkan kepada responden.
- 2) Data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah kondisi/ geografi serta sejarah Desa

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari para responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket/kuisisioner.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa data dan informasi penunjang penelitian, didapat dan diolah dari sumber intern perusahaan, maupun dari sumber ekstern lain yang relevan dan diperoleh melalui literatur, jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian,
2. Wawancara, teknik ini digunakan peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala desa atau pegawai yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.
3. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada responden.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah, guna memperoleh informasi yang

berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (obyektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang lebih baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal (*reliable*). dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data obyektif.

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2001) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Sugiyono (2016) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan rumus dengan angka sakar sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum x^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r = Koefisien Korelasi

X = skor Pertanyaan (ke N)
Y = Variabel bebas (Independent)
Y = Variabel bebas (Independent)
N = jumlah Responden

Selanjutnya diitung dengan uji t dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Diminta

t = Nilai t hitung

n = Jumlah reponden

r = koefisien korelasi hasil r hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di transformasi kenilai t – student dan dibandingkan dengan tabel – t pada derajat bebas (n-2), taraf signifikansi yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilainya lebih besar dari nilai t tabel, maka pertanyaan dikatakan valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t, maka pertanyaan dikatakan tidak valid.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas dan besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dapat diketahui dengan menggunakan koefisiensi korelasi, seperti pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Koefisien Korelasi

R	Keterangan
0,000 - 0,199	Korelasi sangat rendah
0,200 - 0,399	Korelasi rendah
0,400 - 0,599	Korelasi sedang
0,600 - 0,799	Korelasi tinggi
0,800 - 1,000	Korelasi sangat tinggi

Sumber : Riduwan (2004:110)

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu instrument memberikan hasil pengukuran yang konsisten, apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Suatu alat ukur atau instrument dalam hal penelitian ini berbentuk kuesioner harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga data yang diperoleh dari pengukuran yang selanjutnya akan digunakan dalam pengujian hipotesis tidak memberikan hasil yang menyesatkan.

Uji reliabilitas instrument hanya dilakukan pada butir-butir valid yang diketahui pada uji validitas instrument. Pengujian *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji tingkat keandalan (*reliability*) dari masing-masing variabel. Apabila nilai cronbach alpha semakin mendekati 1 mengidentifikasi bahwa semakin tinggi pula konsistensi reliabilitasnya. Untuk menghitung uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus *alpha cronbach* menurut Ghozali (2005:45) dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{st} \right)$$

Keterangan :

K = Jumlah instrument pertanyaan

$\sum Si^2$ = Jumlah varians dalam setiap instrumen

S = Varians keseluruhan instrument

Suatu variabel di katakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* $>0,60$ (Ghozali, 2005:46). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercayai.

3. Transformasi Data Ordinal ke Interval

Untuk mengukur variabel-variabel tersebut akan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang terkumpul adalah data dengan skala ordinal, sedangkan untuk menganalisis data pada penelitian ini diperlukan data dengan ukuran skala interval, hal ini disebabkan karena alat-alat analisis statistik yang digunakan adalah statistik parametrik (misalnya: *korelasi product moment*, *pearson regresi linear*, *path analysis*, dan *structural equatin modelling*). Statistik parametrik mensyaratkan bahwa jenis data yang digunakan adalah harus data interval.

Harun Al-Rasyid (1993) dalam Riduwan (2007), mengemukakan bahwa teknik yang dalam *transformasi scale value* data ordinal ke data interval adalah *Method of Succesive Interval (MSI)* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Hitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya.
- b. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n.
- c. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden.

- d. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi.
- e. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*).
- f. Menghitung *scale value* untuk masing-masing pilihan dengan rumus:

$$SV \text{ (scale value)} = \frac{(\text{density at lower limit}) - (\text{density at upper limit})}{(\text{area under upper limit}) - (\text{density under lower limit})}$$

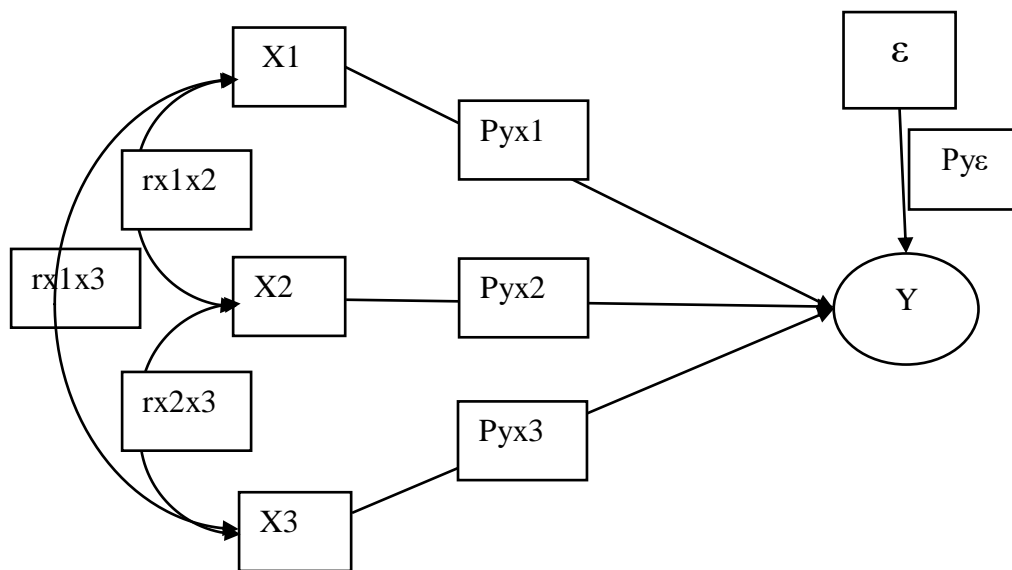
Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| Density at lower limit | : Kepadatan batas bawah |
| Density at upper limit | : Kepadatan batas atas |
| Area under upper limit | : Daerah dibawah batas atas |
| Density under lower limit | : Daerah dibawah batas bawah |

3.2.7 Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur yaitu digunakan untuk mengukur besarnya faktor Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), dan Pengalaman (X3) yang mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada Desa-Desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango

Untuk memastikan sub-sub variabel apakah ada pengaruh Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), dan Pengalaman (X3) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y), maka pengujian dilakukan dengan uji analisi jalur, dengan terlebih dahulu mengkonversi data ordinal ke skala interval serta analisi jalur dapat dilihat gambar berikut :



Gambar 3.1. Struktur Path analisis

Keterangan :

X1 = Pendidikan

X2 = Pelatihan

X3 =Pengalaman

Y =Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

ε = Variabel lain yang mempengaruhi Y

r = korelasi antar variabel X

PY = koefisien jalur untuk mendapatkan pengaruh langsung

Data yang terkumpul di analisis hubungan kausalnya antara variabel-variabel atau dimensi-dimensi yang di lakukan dengan menggunakan anlisis jalur (*path analisys*) yang memperlihatkan pengaruh. Gambar di atas juga memperlihatkan bahwa sub-sub variabel tersebut tidak hanya di pengaruhi oleh X1, X2, X3, X4 tetapi ada variabel epselon (ε) yaitu variabel yangtidak diukur dandi teliti.

3.2.8 Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan hipotesis dan desain penelitian yang telah di kemukakan sebelumnya, maka dalam pengujian hipotesis menggunakan *path analysis* (Nirwana dalam Ucon Arif, (2005) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat persamaan struktural, yaitu :

$$Y = \text{Py}_{X_1}X_1 + \text{Py}_{X_2}X_2 + \text{Py}_{X_3}X_3 + \varepsilon$$

2. Menghitung matriks korelasi antar X_1, X_2, X_3 dan Y
3. Menghitung matriks korelasi antar variabel *eksogenus*
4. Menghitung matriks invers R_1^{-1}
5. Menghitung koefisien jalur Py_{X_i} ($i = 1, 2, 3$)
6. Menghitung $R^2_y (X_1, X_2, X_3)$ yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total (X_1, X_2, X_3), terhadap Y .
7. Hitung pengaruh variabel lain (Py_ε) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Py}_\varepsilon = \sqrt{1 - R^2_y (X_1, X_2, X_3)}$$

8. Menghitung Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaram Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango

Kecamatan Bone adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 4 kecamatan, Kecamatan Bone terdiri dari 14 Desa yang meliputi : Bilolantunga, Waluhu, Tumbu Mekar, Monano, Cendana Putih, Sogitia, Molamahu, Inogaluma, Permata, Taludaa, Masiaga, Ilohuuwa, Muara Bone, Moodulio.

4.1.2 Keadaan Geografis

Luas wilayah Kecamatan Bone, secara keseluruhan adalah 72,71 km². Desa terluas di Kecamatan Bone adalah Taludaa, dengan presentase sebesar 17,84% dan desa yang memiliki luas terkecil adalah desa Cedana Putih, dengan Luas presentase sebesar 0,59%. Berdasarkan Geogrefisnya, Kabupaten Bone Bolango memiliki batas-batas: Utara- Kabupaten Bolaang Mongondow (Provinsi Sulawesi Utara) dan Kabupaten Gorontalo Utara Selatan – Teluk Tomini;Barat-kabupaten Gorontalo.

4.1.3 Kondisi Desa

Iklim Keadaan iklim di desa kecamatan bone terdiri dari Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara

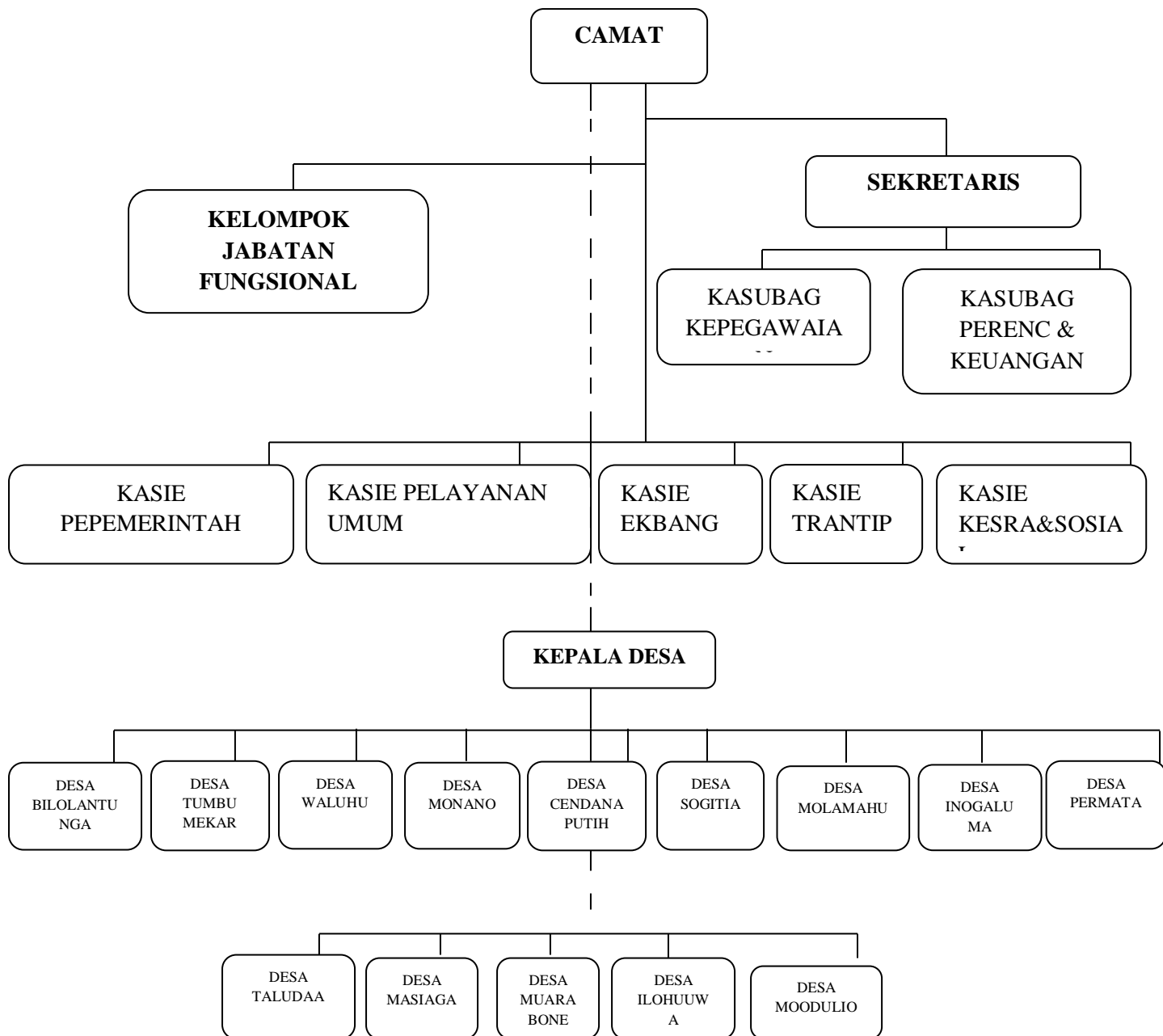
bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni. Tingkat Pendidikan Jumlah penduduk di desa kecamatan bone sebanyak 10.214 jiwa. sedangkan tingkat pendidikan masyarakat yang ada dikecamatan tergolong rendah. Tingkat pendidikan digolongkan kedalam tingkatan SD, SMP, SMA dan Sarjana serta terdapat masyarakat yang tidak bersekolah. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 105 orang SMP sebanyak 70 orang, SMA sebanyak 509 orang dan Sarjana sebanyak 200 orang. Selebihnya penduduk di kecamatan bone tidak bersekolah.

Mata Pencarian Mata Pencarian masyarakat yang ada di Desa Kecamatan Bone mayoritas Petani dan Nelayan yang berjumlah 341 orang, dan untuk kaum perempuan untuk membantu perekonomian keluarga berprofesi sebagai pedagang sebanyak 100 orang. Disisi lain di Kecamatan Bone juga terdapat PNS sebanyak - orang dan karyawan sebanyak - orang. Penduduk yang tidak terdata selebihnya tidak mempunyai mata pencarian

4.1.4 Visi Dan Misi

Visi Dan Misi adalah merupakan tujuan dan sasaran utama dari suatu organisasi dalam mencapai cita-citakan suatu organisasi. Adapun yang menjadi Visi dari Kabupaten Bone Bolango yang juga menjadi Visi Kecamatan Bone adalah : Bone Bolango Maju Cemerlang, dan Misi kecamatan Bone yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Moderen dan Berbudaya

4. 1.5 Struktur Pemerintahan Di Kecamatan Bone



Sumber: kantor kecamatan bone

4.2. Tabel

Anggaran Dana Desa Dikecamatan Bone Anggara Dana Desa

Tahun 2021

Nama Desa	Pagu Anggaran Dana Desa	Pagu Dana Desa	Total ADD & DD
Taludaa	316,020,000	899,705,000	1,215,725,000
Sogitia	336,370,000	1,004,308,000	1,340,678,000
Moodulio	335,880,000	944,031,000	1,279,911,000
Bilonlantunga	335,353,000	879,197,000	1,214,550,000
Inogaluma	335,252,000	866,777,000	1,202,029,000
Monano	335,156,000	854,914,000	1,190,070,000
Tumbuh			
Mekar	310,618,000	862,593,000	1,173,211,000
Molamahu	311,170,000	930,483,000	1,241,653,000
Masiaga	310,585,000	858,497,000	1,169,082,000
Ilohuuwa	310,844,000	890,437,000	1,201,281,000
Muara Bone	335,100,000	848,104,000	1,183,204,000
Cendana Putih	310,365,000	831,477,000	1,141,842,000
Waluhu	310,270,000	819,714,000	1,129,984,000
Permata	310,322,000	826,074,000	1,136,396,000
TOTAL	4,503,305,000	12,316,311,000	16,819,616,000

Sumber: Kantor Kecamatan Bone

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa yang di anggarkan kepemerintah desa di tahun 2021 yaitu 16 Miliar Dengan adanya

anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan meningkatkan jumlah desa yang mandiri dan mengurangi desa yang tertinggal di tahun-tahun yang mendatang.

4.1.7 Karakteristik responden

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang ada di Kecamatan Bone berjumlah 56 orang. Berdasarkan hasil dari edaran kuesioner dari jumlah kuesioner yang diedarkan sebanyak 154 responden yang mengembalikan kuesioner hanya 56 responden sedangkan kuesioner yang tidak dikembalikan sebanyak 98. Dengan demikian sampel yang diolah dalam penelitian ini total berjumlah 56 orang responden. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang di sebar	56
Kuesioner yang tidak dikembalikan	-
Kuesioner yang rusak/tidak lengkap	-
Kuesioner yang dikembalikan	56

Sumber data: Data olahan

Berdasarkan jumlah responden yang mengembalikan kuesioner yaitu sebanyak 56 orang maka berikut ini akan dijelaskan analisis deskriptif dari responden tersebut :

1). Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden menjelaskan jumlah aparat desa yang bekerja didesa-desa dikecamatan Bone sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	25	44.09%
2	Wanita	31	55.91%
	Jumlah	56	100%

Sumber : Data olahan

Dari 56 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini maka jumlah perempuan sebanyak 31 orang, sedangkan jumlah laki-laki juga sebanyak 25 orang. Jika dipersentasikan maka perempuan sebanyak 55,91% demikian juga jumlah laki-laki juga sebanyak 44,09%.

2). Usia Responden

Usia responden menjelaskan umur dari masing masing aparat desa yang bekerja di desa-desa di kecamatan Bone sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Usia Responden

Kriteria	Jumlah	Persen
20-30 tahun	39	53%
31-40 tahun	10	17%
41-50 tahun	6	28%
>51 tahun	1	3%
Jumlah	56	100%

Sumber : Data olahan

Dari 56 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini maka jumlah responden dengan usia 20 s/d 30 tahun sebanyak 39 orang atau 53%. Usia antara 31 s/d 40 tahun sebanyak 10 orang atau 17%. Usia antara 41 s/d 50 tahun sebanyak 6 orang atau 28%. Dan usia di atas 51 tahun sebanyak 1 orang atau 3%. Dengan

hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aparat desa didominasi oleh generasi muda atau usia-usia yang tergolong produktif.

3). Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.6. Tingkat pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	20	33.90%
2	D3	1	1,69%
3	S1	31	56.94%
5	S2	4	8,47%
	Jumlah	56	100%

Sumber : Data Mentah Yang Diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui bahwa sebagai besar pegawai pada kantor Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango yang menjadi responden penelitian ini didominasi tingkat pendidikan S1 sebanyak 31 pegawai atau 56,94% dari jumlah responden. Tingkat SMA sebanyak 20 pegawai atau 33,90% dari jumlah Responden, kemudian tingkat D3 sebanyak 1 pegawai atau 1,69% dari jumlah responden dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 4 pegawai atau 8,47% dari jumlah responden.

4.2 Diskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Variabel Penelitian

Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini dapat menjelaskan kualitas pengelolaan keuangan desa (Y) bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor berdasarkan bobot option (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot options dengan frekuensi. Berikut proses perhitungannya:

Bobot terendah x item x jumlah responden : $1 \times 1 \times 56 = 56$

Bobot tertinggi x item x jumlah responden : $5 \times 1 \times 56 = 280$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentan skala —
 penelitian sebagai berikut : Rentang skalanya yaitu $\frac{180 - 56}{5} = 44,8$ dibulatkan
 menjadi 45

Tabel 4.7

Skala Penelitian Jawaban Responden

No	Rentang	Kategori
1	56-101	sangat rendah
2	102-146	Rendah
3	147-191	Sedang
4	192-247	Tinggi
5	248-280	Sangat tinggi

Sumber : Data Mentah Yang Diolah, 2021

Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing item
 pernyataan dapat dijabarkan pada tabel berikut :

1). Gambaran Umum Pendidikan (X1)

Kemampuan aparat (X1) Desa terdiri dari 2 item pernyataan, berdasarkan
 tabulasi data dari jawaban koesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh
 nilai untuk masing-masing indikator dari Kemampuan Aparat Desa (X1). Menurut
 tanggapan responden dapat dilihat dari halaman berikut :

Tabel 4.8

Nilai (Skor) Variabel Pendidikan (X1)

Tangga. Resp.	Item Pernyataan X1.1			Item Pernyataan X1.2		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	7	35,0	13	2	10,0	4
4	24	96,0	43	21	84,0	38
3	17	51,0	30	13	39,0	23

2	8	16,0	14	13	26,0	23
1	-	-	-	7	7,0	13
Jumlah	56	198	100%	56	166	100%
Kategori	Tinggi			Tinggi		

Sumber Data : Koesioner diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 56 responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X1) sebagai berikut : Item 1 tanggapan responden mengenai indikator Pendidikan umum dengan nilai kategori tanggapan responden sebanyak 7 responden yang menjawab selalu atau (13%) dari total responden, 24 responden atau (43%) dari total responden menjawab setuju, 17 responden atau (30%) menjawab kadang-kadang dan masih terdapat 8 orang responden atau (14%) kadang-kadang Pada item pertanyaan 1 memperoleh skor sebesar 198 dan berada pada kategori Tinggi

Item pernyataan 2 tentang pendidikan khusus dengan nilai kategori tanggapan responden sebanyak 2 atau (4%) responden yang menjawab selalu 21 atau 38% responden menjawab sering, 13 atau (23%) menjawab kadang-kadang, begitu halnya dengan yang menjawab jarang sebanyak 13 atau (23%) dan masih terdapat 7 orang responden atau (13%) menjawab tidak pernah. Pada item pertanyaan 2 memperoleh skor sebesar 166 dan berada pada kategori Tinggi

Berdasarkan perhitungan nilai skor dapat disimpulkan bahwa indikator item pertanyaan 1 mempunyai skor paling tinggi yakni memiliki skor sebesar 198 lalu disusul oleh item pertanyaan 2 dengan skor 166, tetapi kesemua indikator dianggap cukup mempunyai pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan aparat desa yang ada di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango telah sesuai dengan pekerjaannya sebab semuanya adalah lulusan sekolah lanjutan atas (SMA) dan terdapat pula responden

yang lulusan perguruan tinggi (Sarjana). Demikian pula halnya kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang dimiliki oleh aparat desa sangat baik karena telah mengikuti ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah dan menyelesaikannya dengan tepat.

2). Analisis Deskriptif Sub Variabel Pelatihan (X2)

Tabel 4.9

Nilai (Skor) Variabel Pelatihan (X2)

Tangga. Resp.	Item Pernyataan X2.1			Item Pernyataan X2.2		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	9	45	16	2	10,0	4
4	22	88	39	21	84,0	38
3	17	51	30	13	39,0	23
2	8	16	14	13	26,0	23
1	-	-	-	7	7,0	13
Jumlah	56	200	100%	56	166	100%
Kategori	Tinggi			Tinggi		

Sumber Data : Koesioner diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 56 responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X2) sebagai berikut :Item pernyataan nomor 1 tentang Materi pelatihan dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan responden adalah tinggi artinya secara rata-rata mereka setuju bahwa aparat desa harus mengetahui bagaimana tata cara dalam melaksanakan pekerjaannya terlihat sebanyak 9 atau (16%) responden yang menjawab selalu, 22 atau (39%) responden menjawab sering, 17 atau (30%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 8 atau 14% menjawab jarang Pada item pertanyaan 1 memperoleh skor sebesar 200 dan berada pada kategori Tinggi

Item pernyataan nomor 2 tentang Metode pelatihan dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan sebanyak 2 atau 4% responden yang menjawab selalu, 21 atau 38% responden menjawab sering, 13 atau 23% menjawab kadang-kadang, begitu halnya dengan yang menjawab jarang sebanyak 13 atau 23% dan masih terdapat 7 orang responden atau 13% menjawab tidak pernah. Pada item pertanyaan 2 memperoleh skor sebesar 166 dan berada pada kategori Tinggi.

Berdasarkan perhitungan nilai skor dapat disimpulkan bahwa indikator item pertanyaan 1 mempunyai skor paling tinggi yakni memiliki skor sebesar 200 lalu disusul oleh item pertanyaan 2 dengan skor 166, tetapi keseluruhan indikator dianggap cukup mempunyai pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

3). Analisis Deskriptif Sub Variabel Pengalaman (X3)

Tabel 4.10

Nilai (Skor) Variabel Pengalaman (X3)

Tangga. Resp.	Item Pernyataan X1.1			Item Pernyataan X1.2			Item Pernyataan X3.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	9	45	16	2	10,0	4	2	10,0	4
4	22	88	39	21	84,0	38	21	84,0	38
3	17	51	30	13	39,0	23	13	39,0	23
2	8	16	14	13	26,0	23	13	26,0	23
1	-	-	-	7	7,0	13	7	7,0	13
Jumlah	56	200	100%	56	166	100%	56	166	100%
Kategori	Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Sumber Data : Koesioner diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 56 responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X3) sebagai berikut : Item pernyataan nomor 1 tentang lama bekerja dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan responden 9 atau 16% yang menjawab selalu, 22 atau 39% responden

menjawab sering, 17 atau 30% menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 8 atau 14% menjawab tidak pernah pada item pertanyaan 1 memperoleh skor sebesar 200 dan berada pada kategori Tinggi

Item pernyataan nomor 2 tentang banyak penugasan dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan responden adalah tinggi artinya secara rata-rata mereka setuju bahwa aparat desa harus teliti dalam melaksanakan pekerjaannya terdapat 2 atau 4% responden yang menjawab selalu, 21 atau 38% responden menjawab sering, 13 atau 23% menjawab kadang-kadang, begitu halnya dengan yang menjawab tidak pernah sebanyak 13 atau 23% dan masih terdapat 7 orang responden atau 13% menjawab kadang-kadang. pada item pertanyaan 2 memperoleh skor sebesar 166 dan berada pada kategori Tinggi.

Item pernyataan nomor 3 tentang banyaknya penugasan dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan responden adalah tinggi artinya secara rata-rata mereka setuju bahwa aparat desa harus teliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat 2 atau 4% responden yang menjawab selalu, 21 atau 38% responden menjawab sering, 13 atau 23% menjawab kadang-kadang, begitu halnya dengan yang menjawab jarang sebanyak 13 atau 23% dan masih terdapat 7 orang responden atau 13% menjawab sangat tidak pernah. Pada item pertanyaan 2 memperoleh skor sebesar 166 dan berada pada kategori Tinggi.

Berdasarkan perhitungan nilai skor dapat disimpulkan bahwa indikator item pertanyaan 1 mempunyai skor paling tinggi yakni memiliki skor sebesar 200 lalu disusul oleh item pertanyaan 2 dengan skor 166 dan yang terakhir oleh item pertanyaan 3 dengan skor 166, tetapi kesemua indikator dianggap cukup mempunyai pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

3). Analisis Deskriptif Sub Variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y)

Tabel 4.11

Nilai (Skor) Variabel Y

Tangga Resp.	Item Pernyataan Y1			Item Pernyataan Y2			Item Pernyataan Y3			Item Pernyataan Y4			Item Pernyataan Y5		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	7	35	13	2	10	4	7	35	13	2	10,0	4	7	35,0	13
4	24	96	43	21	84,0	38	24	96	43	21	84,0	38	24	96,0	43
3	17	51	30	13	39,0	23	17	51	30	13	39,0	23	17	51,0	30
2	8	16	14	13	26,0	23	8	16	14	13	26,0	23	8	16,0	14
1	-	-	-	7	7,0	13	-	-	-	7	7,0	13	-	-	-
Jumlah	56	200	100 %	56	166	100 %	56	166	100 %	56	166	100 %	56	198	100 %
Katego ri	Tinggi			Tinggi			Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Sumber Data : Koesioner diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 56 responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (Y) sebagai berikut :Item pernyataan nomor 1 tentang perencanaan dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan responden adalah tinggi artinya secara rata-rata bahwa aparat desa harus mengetahui bagaimana tata cara dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat 7 atau 13% responden yang menjawab selalu, 24 atau 43% responden menjawab sering, 17 atau 30% menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 8 atau 14% menjawab tidak pernah pada item pertanyaan 1 memperoleh skor sebesar 200 dan berada pada kategori Tinggi.

Item pernyataan nomor 2 tentang pelaksanaan dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan responden adalah tinggi artinya secara rata-rata mereka setuju bahwa aparat desa harus teliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari hasil

tersebut terlihat bahwa terdapat 2 atau 4% responden yang menjawab selalu, 21 atau 38% responden menjawab sering, 13 atau 23% menjawab kadang-kadang, begitu halnya dengan yang menjawab jarang sebanyak 13 atau 23% dan masih terdapat 7 orang responden atau 13% menjawab sangat tidak pernah. Pada item pertanyaan 2 memperoleh skor sebesar 166 dan berada pada kategori Tinggi.

Item pernyataan nomor 3 tentang penatausahaan dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan responden adalah tinggi artinya secara rata-rata mereka setuju bahwa aparat desa harus teliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat 7 atau 13% responden yang menjawab selalu, 24 atau 43% responden menjawab sering, 17 atau 30% menjawab kadang-kadang, begitu halnya dengan yang menjawab tidak pernah sebanyak 8 atau 14%. Pada item pertanyaan 2 memperoleh skor sebesar 166 dan berada pada kategori Tinggi.

Item pernyataan nomor 4 tentang pelaporan dalam pekerjaan memiliki nilai kategori tanggapan responden adalah tinggi artinya secara rata-rata bahwa aparat desa harus teliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat 2 atau 4% responden yang menjawab selalu, 21 atau 38% responden menjawab sering, 13 atau 23% menjawab kadang-kadang, begitu halnya dengan yang menjawab jarang 13 atau 23% dan masih terdapat 7 orang responden atau 13% menjawab sangat tidak pernah. Pada item pertanyaan 4 memperoleh skor sebesar 166 dan berada pada kategori Tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai pertanggung jawaban dengan nilai kategori tanggapan responden adalah sangat tinggi. Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat 7 responden yang menjawab selalu atau 13% dari total responden, 24 responden atau 43% dari total responden menjawab sering, 17 responden atau

30% menjawab kadang-kadang, dan masih terdapat 8 orang responden atau 14% menjawab tidak pernah. Pada item pertanyaan 5 memperoleh skor sebesar 198 dan berada pada kategori Tinggi.

Berdasarkan perhitungan nilai skor dapat disimpulkan bahwa indikator item pertanyaan 1 mempunyai skor paling tinggi yakni memiliki skor sebesar 200 lalu disusul oleh item pertanyaan 1 dengan skor 166, lalu item nomor 2 dengan skor 166, item pertanyaan nomor 3 dengan skor 166 dan yang terakhir oleh item pertanyaan 5 dengan skor 198, tetapi kesemua indikator dianggap cukup mempunyai pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

4.2.1 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Dalam suatu penelitian kesahihan (validitas) dan Kehandalan (reliabilitas) suatu hasil penelitian tergantung pada alat pengukur (Instrumen yang digunakan dan data yang diperoleh. Jika alat pengukur yang digunakan tidak sah dan tidak andal maka hasilnya tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya keadaan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan pengujian yaitu tes kesahihan dan tes kehandalan.

Pengujian instrument penelitian ini baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 56 responden dan Untuk uji validitas digunakan kriteria nilai t hitung $>$ t tabel maka dikatakan valid (Sugiyono 2012) dan untuk uji reliabilitas adalah reliabel jika nilai Alpha Crombach $>$ 0.60 (Ghozali, 2005:46).

4.2.2 Hasil Uji Validitas dan reliabilitas variabel Pendidikan

Berdasarkan hasil olehan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel Pendidikan (X1) pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pendidikan

Variabel	Indikator	Uji Validitas				Uji Reabilitas	
		r_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Pendidikan (X1)	1	0,962	25,890	2,005	Valid	0,924	>0,60: Reliabel
	2	0,966	27,456		Valid		

Sumber data : Kuisoner diolah 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Pendidikan (X1) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,924 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Pendidikan (X1) adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

4.2.3 Hasil Uji Validitas dan reliabilitas variabel Pelatihan

Berdasarkan hasil olehan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel Pelatihan (X2) pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pelatihan

Variabel	Indikator	Uji Validitas				Uji Reabilitas	
		r_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Pelatihan (X2)	1	0,947	21,663	2,005	Valid	0,847	>0,60: Reliabel
	2	0,921	17,373		Valid		

Sumber data : Kuisoner diolah 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Pelatihan (X2) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,847 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Pelatihan (X2) adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$

4.2.4 Hasil Uji Validitas dan reliabilitas variabel Pengalaman

Berdasarkan hasil olehan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel Pengalaman (X3) pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengalaman

Variabel	Indikator	Uji Validitas				Uji Reabilitas	
		r_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Pengalaman (X3)	1	0,886	14,041	2,005	Valid	0,805	>0,60: Reliabel
	2	0,810	10,150		Valid		
	3	0,861	12,440		Valid		

Sumber data : Kuissoner diolah 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Pengalaman (X3) menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,805 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Pengalaman (X3) adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

4.2.5 Hasil Uji Validitas dan reliabilitas variabel Y

Berdasarkan hasil olehan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel Y pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel (Y)

Variabel	Indikator	Uji Validitas				Uji Reabilitas	
		r_{hitung}	t_{hitung}	t_{tabel}	Ket	Alpha	Ket
Kualitas pengelolaan keuangan (Y)	1	0,924	17,757	2,005	Valid	0,917	>0,60: Reliabel
	2	0,897	14,912		Valid		
	3	0,873	13,153		Valid		
	4	0,900	15,173		Valid		
	5	0,752	8,383		Valid		

Sumber data : Kuissoner diolah 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Y menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,917 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Y adalah reliabel karena alpha cronbach $> 0,60$.

4.3 Analisis Data Statistik Dan Pengujian Hipotesis

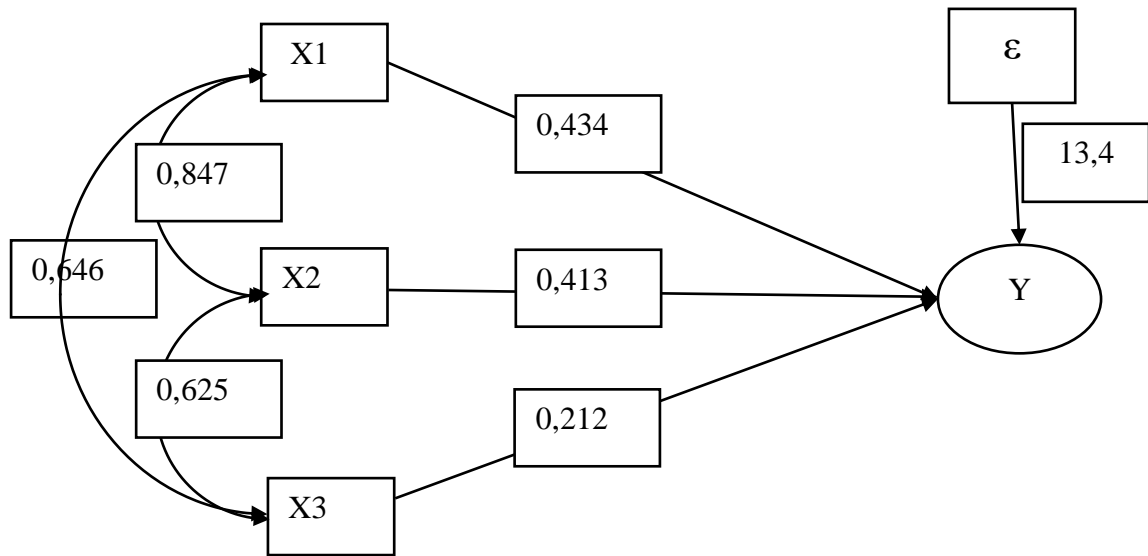
Tabel 4.16
Hasil Struktur Jalur (path analysis)

Hubungan antar variabel	Koefisien	Nilai Sig	Alpha (α)	Keputusan	Kesimpulan
$Y \leftarrow X_1, X_2, X_3$	0.866	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_1$	0,434	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_2$	0,413	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_3$	0,212	0,021	0,05	Signifikan	Diterima

Keterangan : berpengaruh apabila nilai sig < nilai Alpha

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dijelaskan oleh variasi variabel Kemampuan Aparat Desa yang terdiri dari Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango sebesar 0.866 (86.6%); variabel Pendidikan (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango sebesar 0.434 (43.4%); variabel Pelatihan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango sebesar 0.413 (41.3%); variabel Pengalaman (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango sebesar 0.212 (21.2%).

Dari hasil estimasi pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman terhadap variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat digambarkan ke dalam structural jalur sebagai berikut:



Gamabar 4.2 Hasil Estimasi Struktur path

dibentuk persamaan fungsional dalam model simultan sebagai berikut :

Persamaan jalur :

$$Y = 0,434 X_1 + 0,413 X_2 + 0,212 X_3 + 13,4 Y\epsilon$$

Dengan $R^2 = 0,866$

Dari persamaan structural jalur, secara sistematis pengaruh variabel Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman secara simultan maupun secara parsial terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.17

Dekomposisi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Keterangan	Pengaruh langsung	Tak langsung	Total
X1 Terhadap Y	0,434	43,4%	43,4%
X2 Terhadap Y	0,413	41,3%	41,3%
X3 Terhadap Y	0,212	21,2%	21,2%
Pengaruh variabel X1,X2,X3 Terhadap Y			86,6%
Pengaruh variabel luar Terhadap Y			13,4%
Total			100%

Sumber : Data diolah 2022

Dari persamaan structural jalur sebagaimana tampilan tabel diatas dapat di jelaskan hubungan antara setiap variabel Variabel Pendidikan (X1) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 0,434 artinya jika Variabel Pendidikan ditingkatkan sebesar satu satuan, maka diikuti dengan kenaikan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 43,4%. Variabel Pelatihan (X2) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 0,413 artinya jika Variabel Pelatihan ditingkatkan sebesar satu satuan, maka diikuti dengan kenaikan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 41,3%. Variabel Pengalaman (X3) memiliki koefisien pengaruh positif terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 0,212 artinya jika Variabel Pendidikan ditingkatkan sebesar satu satuan, maka diikuti dengan kenaikan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 21,2%. Nilai R pada persamaan jalur di atas sebesar 0,866 atau 86,6% mengindikasikan bahwa variasi nilai variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) ditentukan oleh variasi variabel Pengaruh Kemampuan Aparat Desa, sedangkan 13,4% di tentukan oleh variasi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model.

4.3 Pembahasan hasil penelitian

4.3.1 Pengaruh Kemampuan Aparat Desa terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi variabe yang meliputi Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), dan Pengalaman (X3), secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) sebesar 86,6%. Nilai korelasi adalah sebesar 0,866 atau 86,6% dan termasuk dalam kategori sangat kuat dan menunjukkan bahwa Kemampuan Aparat Desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Boalango akan bermanfaat untuk meningkatkan

kualitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa. sehingga kualitas para aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa berupa adanya transparansi, terwujudnya akuntabilitas, partisipatis masyarakat yang tinggi, dan disiplin terhadap anggaran dapat capai.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisul Muzahid (2014), pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai Terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Di aceh utara menggunakan metode analisis deskriptif, kemudian pengujian hipotesis dipakai metode analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruri Widiastuti (2013), Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung. Menggunakan Metode analisis deskriptif, kemudian pengujian hipotesis dipakai metode regresi berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara *simultan* maupun *parsial* Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Perbedaan dengan penelitian ini adalah, tahun penelitian metode analisis data dan lokasi penelitian.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini diterima bahwa Pengaruh Kemampuan Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada Kantor Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango

4.3.2 Pengaruh Pendidikan (X1) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa Pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, Besarnya pengaruh ini merupakan terkecil pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar hasil uji hipotesis dan secara empiris dilapangan berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan bahwa Pendidikan memberikan kontribusi terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya.

Pengetahuan merupakan fakta, informasi, dan keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan, baik secara teori maupun pemahaman praktis, pengetahuan di bidang sistem akuntansi yang harus dimiliki oleh seluruh aparat desa disemua tingkat atau jenjang jabatan, Hasil penelitian ini sejalan dengan Mukhlisul Muzahid (2014), yang mengemukakan bahwa Tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Uraian ini mengukuhkan bahwa temuan penelitian di atas memiliki dasar teoritik yang kuat, Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima (terbukti) bahwa Pendidikan (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) tentang kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memberikan hasil yang tidak signifikan. Hasil ini mampu membuktikan bahwa kompetensi aparat dari segi pengetahuan akan berhasil apabila didukung oleh aparat desa yang memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Sebagaimana penelitian Nurkhasanah yang meneliti di desa tertinggal yang menemukan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini diterima bahwa Pendidikan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada Kantor Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango

4.3.3 Pengaruh Pelatihan (X2) terhadap Kualitas Pengelolaan keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pelatihan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas Pengelolaan Keuangan Desa. Besarnya pengaruh merupakan penentu dominan pengaruhnya terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa. Dari uji hipotesis dan secara empiris dilapangan dengan sebaran kuesioner menunjukkan bahwa Pelatihan memberikan kontribusi terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pelatihan merupakan unsur kompleks yang diberikan untuk membantu karyawan mempelajari keterampilan yang akan meningkatkan kinerja mereka dimana akan membantu perusahaan mencapai sasarannya. Pelatihan dan pengembangan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan

pada praktik dari pada teori. Sementara itu keterampilan adalah meliputi pengertian physical skill, intellectual skill, manajerial skill, dan lain-lain (Rahmawati, 2008: 117).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mukhlisul Muzahid (2014), yang mengemukakan bahwa Tingkat pelatihan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Uraian ini mengukuhkan bahwa temuan penelitian di atas memiliki dasar teoritik yang kuat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima (terbukti) bahwa Pelatihan (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukah (2019), tentang kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Wonosobo memberikan hasil yang positif dan signifikan. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbasari dan Yuniarta (2016) yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jembrana.

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini diterima bahwa Pelatihan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada Kantor Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango

4.3.4 Pengaruh Pengalam (X3) terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa Pengalaman secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Pengelolaan keuangan Desa besarnya pengaruh ini bukan merupakan penentu

dominan pengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan keuangan Desa. Dari hasil uji hipotesis dan secara empiris dilapangan dengan sebaran kuesioner menunjukan bahwa Pengalaman memberikan kontribusi terhadap Kualitas Pengelolaan keuangan Desa.

Semakin luas pengalaman kerja seseorang, maka semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan, dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan merupakan kemampuan untuk melakukan tugas dengan lebih baik atau lebih baik dari rata-rata. Dalam Taksonomi Bloom, keterampilan masuk dalam ranah Psikomotor yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Pengalaman kerja seseorang menunjukan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberi peluang besar bagi seseorang yang melakukan pekerjaan yang lebih baik. Secara psikis, pengalaman akan membentuk pribadi seseorang, yaitu akan membuat seseorang lebih bijaksana baik dalam berpikir maupun bertindak. Karena pengalaman seseorang akan merasakan posisinya saat dia dalam keadaan baik dan saat dia dalam keadaan buruk. Dian Indri Purnamasari (2005) dalam Singgih dan Bawono (2010) memberikan kesimpulan bahwa seseorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam di beberapa hal diantaranya: mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, mencari penyebab munculnya kesalahan. Jadi pengalaman merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah profesi yang membutuhkan profesionalisme yang sangat tinggi seperti akuntan publik, karena pengalaman akan mempengaruhi kualitas pekerjaan seorang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mukhlisul Muzahid (2014), yang mengemukakan bahwa Tingkat pengalaman secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Uraian ini mengukuhkan bahwa temuan penelitian di atas memiliki dasar teoritik yang kuat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima (terbukti) bahwa Pengalaman (X3) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini diterima bahwa Pengaruh Pengalaman secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) pada Kantor Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemampuan Aparat Desa yang terdiri dari : Pendidikan (X1), Pelatihan (X2), dan Pengalaman (X3), secara simultan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa(Y) di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

2. Pendidikan (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Di kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango
3. Pelatihan (X2) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.
4. Pengalaman (X3) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualiatas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Bone perlu meningkatkan pengetahuan dari aparat pengelolaan dana desa terutama dalam hal pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparat desa masih sangat terbatas. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan studi banding ke desa-desa yang sudah lebih maju atau dapat juga dilakukan dengan melakukan workshop pengelolaan anggaran dana desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar memasukkan variabel lain diluar model yang berpengaruh terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa seperti komitmen organisasi dan sistem pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, 2001, Metodologi Penelitian, Penerbit Gramedia, Jakarta

Azhar, 2007, melakukan penelitian tentang “Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya ”. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.12, No. 1, Maret 2010: 42-55.

BPKP 2015, Modul Pengelolaan Keuangan Desa

Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasibuan, Melayu S.P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara,

Harhinto. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (Terjemahan)*. Jakarta: PT. Intermasa

Jelita 2013. Hubungan Keterampilan dan Pekerjaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Ibu Rumah Tangga Peserta Pelatihan Eceng Gondok Usaha Kecil dan Menengah Luthfi Craft di Desa Murtigading Piring II, Sanden, Bantul. *Tesis Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY. Yogyakarta

Kusharyanti, 2003. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Majalah Media Akuntansi. (2014 Oktober- November). Waspada titik kritis pengucuran dana desa dan mencetak desa melek akuntansi. Majalah Media Akuntansi, hal. 28-31

Mardisardan Sari, 2007. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. Jakarta: Kaditama Revbang BPK-RI

Rahmawati, 2008 Peningkatan Daya saing *UKM untuk mendukung Program PEL*. Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing. Jakarta: Graha Sucofindo

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Permendesa Nomor 3 tahun 2015

Permendagri No. 113 Tahun 2014

Riduwan , 2005, *Skala Pengukuran variabel-variabel Penelitian*, Penerbit Alfabeta Bandung

Riduwan, dan Kuncoro, Engkos_Achmad. 2007. *Cara Menggunakan Dan Menggunakan Analisis Jalur*, cetakan pertama. Penerbit Alfabeta Bandung.

SK Menteri Dalam Negeri Nomor:140/640 SJ tanggal 22 Maret2005

Sutrisno, Edy.2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Kencana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor72Tahun2005

Undang-Undang Nomor 32Tahun2004

Wahjudin, Sumpeno (2011) *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh Re-Inforcement Actionand Development.

Widjaja, HAW. (2004) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Widiyastuti. 2009. *Pengaruh Ketrampilan, Pengetahuan, Kemampuan SDM Terhadap Kinerja UKM*.Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta:PGRI

DAFTAR LAMPIRAN

Data Ordinal Sub Variabel Pendidikan (X1)

Resp.	Item Pernyataan		JUMLAH
	1	2	
1	3	3	6
2	4	4	8
3	4	4	8
4	3	3	6
5	3	3	6
6	4	4	8
7	4	4	8
8	4	4	8
9	3	3	6
10	4	4	8
11	3	3	6
12	3	3	6
13	3	3	6
14	5	5	10
15	2	2	4
16	5	5	10
17	4	4	8
18	5	5	10
19	4	4	8
20	4	4	8
21	4	4	8
22	5	5	10
23	3	3	6
24	4	4	8
25	5	5	10
26	4	4	8
27	4	4	8
28	3	3	6
29	3	3	6
30	4	4	8
31	4	4	8
32	3	3	6
33	3	3	6
34	4	4	8
35	3	3	6
36	3	3	6
37	3	3	6
38	5	5	10
39	2	2	4
40	5	5	10
41	4	4	8
42	5	5	10
43	4	4	8
44	4	4	8
45	4	4	8
46	3	3	6
47	4	4	8
48	4	4	8
49	3	3	6
50	3	3	6
51	4	4	8
52	4	4	8
53	4	4	8
54	3	2	5
55	5	2	7
56	4	4	8

Lampiran 2. Data Ordinal Sub Variabel Pelatihan (X2)

NO	Item Pernyataan		JUMLAH
	1	4	
1	4	4	8
2	5	5	10
3	4	5	9
4	4	4	8
5	4	3	7
6	4	4	8
7	3	4	7
8	3	4	7
9	3	4	7
10	5	4	9
11	2	4	6
12	5	4	9
13	4	4	8
14	5	4	9
15	4	4	8
16	5	4	9
17	4	4	8
18	5	4	9
19	4	4	8
20	4	4	8
21	4	4	8
22	5	5	10
23	3	3	6
24	4	4	8
25	5	5	10
26	4	4	8
27	4	4	8
28	3	3	6
29	3	3	6
30	4	4	8
31	4	4	8
32	3	3	6
33	3	3	6
34	4	4	8
35	3	3	6
36	3	3	6
37	3	3	6
38	5	5	10
39	2	2	4
40	5	5	10
41	4	4	8
42	5	5	10
43	4	4	8
44	4	4	8
45	4	4	8
46	3	3	6
47	4	4	8
48	4	4	8
49	3	3	6
50	3	3	6
51	4	4	8
52	4	4	8
53	3	4	7
54	4	4	8
55	3	3	6
56	4	4	8

Lampiran 2. Data Ordinal

Sub Variabel Pengalaman (X3)

NO	Item Pernyataan			JUMLAH
	1	2	3	
1	3	4	4	11
2	4	5	5	14
3	4	4	5	13
4	3	4	4	11
5	3	4	3	10
6	4	4	4	12
7	4	3	4	11
8	4	3	4	11
9	3	3	4	10
10	4	5	4	13
11	3	2	4	9
12	3	5	4	12
13	3	4	4	11
14	5	5	4	14
15	2	4	4	10
16	5	5	4	14
17	4	4	4	12
18	5	5	4	14
19	4	4	4	12
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	5	5	5	15
23	3	3	3	9
24	4	4	4	12
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	4	4	4	12
28	3	3	3	9
29	3	3	3	9
30	4	4	4	12
31	4	4	4	12
32	3	3	3	9
33	3	3	3	9
34	4	4	4	12
35	3	3	3	9
36	3	3	3	9
37	3	3	3	9
38	5	5	5	15
39	2	4	2	8
40	5	5	5	15
41	4	4	4	12
42	5	4	5	14
43	4	4	4	12
44	4	5	4	13
45	4	3	4	11
46	3	4	3	10
47	4	5	4	13
48	4	4	4	12
49	3	4	3	10
50	3	3	3	9
51	4	3	4	11
52	4	2	4	10
53	4	4	4	12
54	4	4	4	12
55	3	3	3	9
56	4	4	4	12

Lampiran 2. Data Ordinal

Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

NO	Item Pernyataan					JUMLAH
	1	2	3	4	5	
1	3	3	4	4	4	18
2	4	4	5	5	5	23
3	4	4	5	4	4	21
4	3	3	4	4	4	18
5	3	3	3	4	4	17
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	3	19
8	4	4	4	4	3	19
9	3	3	4	4	3	17
10	4	4	4	4	5	21
11	3	3	4	4	2	16
12	3	3	4	5	5	20
13	3	3	4	4	4	18
14	5	5	4	5	5	24
15	2	2	4	4	4	16
16	5	5	4	5	5	24
17	4	4	4	4	4	20
18	5	5	4	5	5	24
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15
34	4	4	4	4	4	20
35	3	3	3	3	3	15
36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	5	5	5	5	5	25
39	2	2	2	2	4	12
40	5	5	5	5	5	25
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	5	5	4	24
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	5	21
45	4	4	4	4	3	19
46	3	3	3	3	4	16
47	4	4	4	4	5	21
48	4	4	4	4	4	20
49	3	3	3	3	4	16
50	3	3	3	3	3	15
51	4	4	4	4	3	19
52	4	2	4	4	4	18
53	4	3	4	5	3	19
54	4	4	4	4	4	20
55	3	3	3	3	3	15
56	4	4	4	4	4	20

Frequencies

x1.
1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	9	16,1	16,1	16,1
4,00	26	46,4	46,4	62,5
Valid 3,00	19	33,9	33,9	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x2.
2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	7	12,5	12,5	12,5
4,00	35	62,5	62,5	75,0
Valid 3,00	13	23,2	23,2	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total 1	56	100,0	100,0	

x2.
1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	11	19,6	19,6	19,6
4,00	27	48,2	48,2	67,9
Valid 3,00	16	28,6	28,6	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x2.
2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	7	12,5	12,5	12,5
4,00	35	62,5	62,5	75,0
Valid 3,00	13	23,2	23,2	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x3.
1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	8	14,3	14,3	14,3
4,00	27	48,2	48,2	62,5
Valid 3,00	19	33,9	33,9	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x3.
2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	12	21,4	21,4	21,4
4,00	27	48,2	48,2	69,6
Valid 3,00	15	26,8	26,8	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

x3.
3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	7	12,5	12,5	12,5
4,00	35	62,5	62,5	75,0
Valid 3,00	13	23,2	23,2	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y.
1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	8	14,3	14,3	14,3
4,00	27	48,2	48,2	62,5
Valid 3,00	19	33,9	33,9	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y.
2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	8	14,3	14,3	14,3
4,00	25	44,6	44,6	58,9
Valid 3,00	20	35,7	35,7	94,6
2,00	3	5,4	5,4	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y.
3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	7	12,5	12,5	12,5
4,00	35	62,5	62,5	75,0
Valid 3,00	13	23,2	23,2	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

y.
4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	11	19,6	19,6	19,6
4,00	32	57,1	57,1	76,8
Valid 3,00	12	21,4	21,4	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total 1	56	100,0	100,0	

y.
5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5,00	12	21,4	21,4	21,4
4,00	27	48,2	48,2	69,6
Valid 3,00	16	28,6	28,6	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	56	100,0	100,0	

Correlations

		Correlations			
		Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman	Kualitaslapk eu
Pendidikan	Pearson Correlation	1	,609**	,820**	,859**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	56	56	56	56
Pelatihan	Pearson Correlation	,609**	1	,530**	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	56	56	56	56
Pengalaman	Pearson Correlation	,820**	,530**	1	,787**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	56	56	56	56
Kualitaslapk eu	Pearson Correlation	,859**	,790**	,787**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	56	56	56	56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,860**	,962**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	56	56	56
X1.2	Pearson Correlation	,860**	1	,966**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	56	56	56
X1	Pearson Correlation	,962**	,966**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	56	56	56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,748**	,947**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	56	56	56
X2.2	Pearson Correlation	,748**	1	,921**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	56	56	56
X2	Pearson Correlation	,947**	,921**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	56	56	56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3
X3.1 Pearson Correlation	1	,527**	,746**	,886**
X3.1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
N	56	56	56	56
X3.2 Pearson Correlation	,527**	1	,501**	,810**
X3.2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
N	56	56	56	56
X3.3 Pearson Correlation	,746**	,501**	1	,861**
X3.3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
N	56	56	56	56
X3 Pearson Correlation	,886**	,810**	,861**	1
X3 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
N	56	56	56	56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations					
		Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	Y
y.1	Pearson Correlation	1	,927**	,746**	,770**	,558**	,924**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56
y.2	Pearson Correlation	,927**	1	,695**	,694**	,552**	,897**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56
y.3	Pearson Correlation	,746**	,695**	1	,871**	,528**	,873**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56
y.4	Pearson Correlation	,770**	,694**	,871**	1	,609**	,900**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	56	56	56	56	56	56
y.5	Pearson Correlation	,558**	,552**	,528**	,609**	1	,752**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	56	56	56	56	56	56
Y	Pearson Correlation	,924**	,897**	,873**	,900**	,752**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	56	56	56	56	56	56

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,924	,925	2

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,847	,856	2

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,805	,813	3

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,917	,919	5

Item	R	r ²	n	r√n-2	√1-r ²	t-hitung	t-tabel	Keputusan
X2.1	0,947	0,897	56	6,959	0,321	21,663	2,005	valid
X2.2	0,921	0,848	56	6,768	0,390	17,373	2,005	valid

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,931 ^a	,866	,858	,88869	,866	111,872	3	52	,000

a. Predictors: (Constant), Pengalaman, Pelatihan, Pendidikan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	265,057	3	88,352	111,872	,000 ^b
Residual	41,068	52	,790		
Total	306,125	55			

a. Dependent Variable: Kualitaslapkeu

b. Predictors: (Constant), Pengalaman, Pelatihan, Pendidikan

Coefisient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,221	,938		2,368	,022
Pendidikan	,953	,209	,434	4,567	,000
Pelatihan	,872	,136	,413	6,429	,000
Pengalaman	,267	,112	,212	2,382	,021

a. Dependent Variable: Kualitaslapkeu

Perhitungan t-hitung

Rumus :

t-hitung

$r\sqrt{n-2}$

Ite m	r	r ²	n	r√n-2	√1-r ²	t- hitung	t- tabel	Ket
X1. 1	0,9 62	0,9 25	56	7,069	0,273	25,890	2,005	val id
X1. 2	0,9 66	0,9 33	56	7,099	0,259	27,456	2,005	val id

Ite m	R	r ²	n	r√n-2	√1-r ²	t- hitung	t- tabel	Ket
X3. 1	0,8 86	0,7 85	56	6,511	0,464	14,041	2,005	val id
X3. 2	0,8 10	0,6 56	56	5,952	0,586	10,150	2,005	val id
X3. 3	0,8 61	0,7 41	56	6,327	0,509	12,440	2,005	val id

Ite m	R	r ²	N	r√n-2	√1-r ²	t- hitung	t- tabel	Ket
Y.1	0,9 24	0,8 54	56	6,790	0,382	17,757	2,005	val id
Y.2	0,8 97	0,8 05	56	6,592	0,442	14,912	2,005	val id
Y.3	0,8 73	0,7 62	56	6,415	0,488	13,153	2,005	val id
Y.4	0,9 00	0,8 10	56	6,614	0,436	15,173	2,005	val id
Y.5	0,7 52	0,5 66	56	5,526	0,659	8,383	2,005	val id



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KANTOR CAMAT BONE

Jln Trans Sulawesi Pantai Selatan Desa Taludaa Kode Pos 96571

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 035/CMT-BN/BB/048/070/V/2022

Assalamu Alaikum Wr,Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristianto Ruhban, SE,M,Si

Nip : 19770914200501 1010

Jabatan : Camat Bone

Dengan Ini Menyatakan Bahwa yang bersangkutan di bawah ini

Nama : Nur Ain Lajambu

Nim : E.11.17.028

Jurusan/ Prodi : Akutansi

Judul Penelitian : PENGARUH KEMAMPUAN APARAT DESATERHADAP
KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO

Benar telah melakukan penelitian dan mengambil data di Kecamatan, Pada tanggal 21 Mei 2021 Terkait dengan kepentingan Penelitian yang dilakukan.

Demikian Surat ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagai mana semestinya.

Bone, 27 Mei 2022

Camat Bone



KRISTIANO RUCHBAN, SE, M, SI
19770914 200501 1010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 070/SRP/FE-UNISAN/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nur Ain Lajambu
NIM : E1117028
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Kemampuan Aparat Desa Terhadap Kualitas
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bone
Kabupaten Bone Bolango

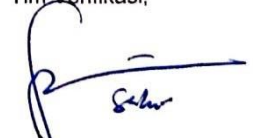
Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 31 Mei 2022
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: 01d25211 17898825

PAPER NAME

perbaikan turnitin.docx

AUTHOR

Nur ain Lajambu

WORD COUNT

11319 Words

CHARACTER COUNT

71961 Characters

PAGE COUNT

72 Pages

FILE SIZE

690.0KB

SUBMISSION DATE

May 30, 2022 5:54 PM GMT+8

REPORT DATE

May 30, 2022 5:58 PM GMT+8

● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nur Ain Lajambu
 Nim : E1117028
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 03 Juli 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Angkatan : 2017
 Email : lajambun@gmail.com
 Alamat : Jl. Sultan Botutihe Kec, Kota Timur
 Kel, Ipilo Kota Gorontalo



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SDN 1.6.7 KOTA TIMUR (2007-2012)
2. SMP NEGERI 1 MARISA (2012-2014)
3. SMK NEGERI 1 MARISA (2014-2016)
4. Strata Satu SI Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo (2017-2022)

Pendidikan Informal

1. Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian KKLP Universitas Ichsan Gorontalo (2020)